

BIAS PEMBERITAAN MEDIA TENTANG PEJABAT PUBLIK

Oleh : Siswanta

ABSTRACT

Siswanta, 2017. "biased news coverage about the public officials". Slamet Riyadi University Surakarta.

This paper aimed to analyze bias of online mass media regarding alleged ethics violation by public officers (speaker of House Representative). The research done about 1 month, mid November till mid Desember 2015. In that time, news about alleged ethics violation who involved the public officer be headline news main stream of conventional mass media and online mass media. The case was being trending topic about 1 month in cyber media. After that periods ending, as time goes by issue setting agenda theory, mass media changed into chief region election issues. The media online Merdeka.com and Suarakarya.id were research object with considered both media have different ideology and politics. Data analysis done by using tool of analysis from Pan and Kosicki which covered 4 structures are syntactic, script, thematic and rhetorical structures. The result found that reality construction which Merdeka.com dan Suarakarya.id constructed put Setya Novanto (SN) on position as public officer who being objected by both media as a people who did ethics violation and authority of incumbency violation, as high class makelar, as speaker of House representative had disgrace Indonesian and SN do not deserve to be role made for other officers. Because of reporting process framing by both online media, its bring out bias of mass media. The bias which brought out from "Papa minta saham" case more dominated of bias by selection of sources and bias by placement. Both media do news capture with referring to news sources with same their ideology and politics. Both editorial do capture and placement news unproportionally.

Keywords : framing, bias, reporting, online media, reality construction.

1. Pendahuluan.

"Papa minta saham" merupakan isu pemberitaan yang menjadi trending topic mainstream media konvensional maupun media online selama kurang lebih satu bulan yaitu pertengahan bulan Nopember sampai pertengahan bulan Desember 2015. Isu tersebut menyangkut pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto. Selama satu bulan, hampir semua media massa menyoroti kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam kasus calo saham PT Freeport Indonesia. Adapun isu tersebut muncul ke permukaan dengan istilah "papa minta saham" lebih dikarenakan sebagai bentuk padanan tindak kejahatan yang dilakukan

Setya Novanto. Istilah tersebut sangat populer karena kasus tersebut muncul ke permukaan di kalangan komunitas pengguna internet termasuk media online, yang lebih dahulu ramai membicarakan tentang tindak kejahatan berupa SMS broadcast yang ditujukan kepada pengguna ponsel yang isinya penipuan agar penerima SMS broadcast tersebut mau mentransfer pulsa sebagaimana yang dikehendaki penipu yaitu pengirim SMS broadcast.

Isu pelanggaran etika Ketua DPR yang berujung pada mundurnya Setya Novanto dari posisi Ketua DPR menjadi trending topic media sosial seperti twitter dan facebook serta mainstream media online selama satu bulan di mana pada dunia maya dengan gampang dijumpai hastag “papa minta saham”, suatu istilah yang cepat menyebar dan dipakai oleh mainstream media massa konvensional dan media online. Istilah tersebut misalnya digunakan oleh media online Merdeka.com pada tanggal 23 Desember 2015 dengan judul berita “Soal Kasus ‘Papa Minta Saham’, Komitmen Jaksa Agung: Kita Tuntaskan!”. Penggunaan istilah yang sama juga terdapat di media online Merdeka.com pada tanggal 24 Desember 2015 dengan judul pemberitaan “Awan mendukung pengusutan kasus papa minta saham di kejaksan agung”. Dengan topik dan penggunaan istilah yang sama, Republika.co.id mengangkat berita dengan judul “Survei: Kasus ‘Papa Minta Saham’ Jadi Topik Terpanas 2015”. Sedangkan Suarakarya.id yang merupakan media massa yang berafiliasi politik dengan Partai Golongan Karya pada tanggal 9 Desember 2015 juga mengusung istilah papa minta saham dalam kepala berita yang berjudul “Papa minta saham: Sulit Buktikan Pidana Ketua DPR”.

Meskipun obyek pemberitaannya sama, Setya Novanto sebagai ketua DPR dalam peristiwa pelanggaran etik terkait pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, namun setiap media massa akan mengangkat berita tersebut dalam sudut pandang yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan redaksi masing-masing media sesuai visi dan misi media yang bersangkutan. Perbedaan sudut pandang pemberitaan media satu sama lain semakin jelas bila mana kita mampu memahami efek penyebab perbedaan dengan menggunakan model IBIL untuk menjelaskan fenomena perbedaan rekonstruksi sosial yang dilakukan oleh setiap media (Thapthiang, 2012).

Model IBIL adalah model analisis framing dengan menggunakan 4 faktor sebagai alat analisis yaitu (1) *Ideology of Media Organization (I)*, (2) *Bad News Outsells Good One (B)*, (3) *Influential Individuals as Major News Sources (I)*, and (4) *Limitation of Time and Space (L)*.

Menilik empat faktor utama sebagai pembeda pola pemberitaan media massa satu sama lainnya, konsumen media massa bisa memaklumi dan dengan bijaksana akan mengkritisi setiap informasi pemberitaan yang tersaji pada media-media tersebut. Nilai-nilai jurnalisme yang obyektif, jujur dan keberpihakan kepada masyarakat sebagaimana yang menjadi tuntutan penganut aliran *responsibility of the press*, akan semakin luntur seiring dengan peminggiran isi pesan yang dilakukan oleh masing-masing media. Kebenaran isi pesan media massa lebih bermuara pada kebenaran intersubyektif yang terbingkai oleh kepentingan ideologi, nilai jual berita, prinsip *name make news* serta alasan pembenaran yang berlindung di balik keterbatasan ruang dan waktu.

Memahami esensi isi pemberitaan suatu media massa dengan cara melakukan analisis framing, akan mengungkap bias media massa. Bias media massa baik yang bersifat bias ideologi, bias gender, bias agama, bias ras atau kesukuan dan sebagainya yang dilakukan terus menerus tanpa kontrol yang bijaksana lambat laun akan mengarah pada *trial by press*, sebuah kejahatan tidak langsung yang dilakukan oleh media massa terhadap obyek pemberitaan.

Di dunia jurnalistik independensi dan obyektifitas merupakan unsur penting yang senantiasa harus dipegang teguh oleh redaksi media massa. Dengan berpegang pada kedua prinsip tersebut media massa bisa menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat luas sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan bijaksana. Namun demikian pada tataran empiris fungsi dan peran tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan dengan sempurna. Sering kali yang kita lihat adalah isi pemberitaan media massa sedikit banyak dipengaruhi kepentingan lain seperti kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi politik dimana organisasi media tersebut berafiliasi, kepentingan popularitas demi menarik anggaran belanja iklan perusahaan dan sebagainya. Akibatnya, hasil akhir atau produk berita yang disajikan ke masyarakat luas akan terasa bias. Realitas yang disusun oleh setiap media massa tidak akan sama meskipun peristiwa obyek pemberitaannya sama.

Berangkat dari konsep analisis framing media massa, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana *merdeka.com* dan *suarakarya.id*, dimana keduanya memiliki afiliasi ideologi politik berbeda, merekonstruksi realitas tentang pelanggaran etika ketua DPR RI. *Suarakarya.id* media massa online yang lahir dan dibesarkan sebagai corong kuasi Partai Golongan Karya, kendaraan politik SN yang mestinya mampu berpegang pada prinsip independen dan obyektif dalam setiap pemberitaannya

akan menghadapi konflik kepentingan yang menyeret Ketua Umum Partai Golkar dalam pusaran kasus korupsi. Berbeda dengan Merdeka.com, media online yang hanya bisa diakses pada situs webside, media ini terlahir dari komunitas pengembang teknologi informasi yang menguasai bahasa pemrograman komputer dalam jaringan (media daring) PHP & Apache/FreeBSD. Secara organisatoris Merdeka.com tidak berafiliasi dengan kekuatan partai politik. Namun demikian tidak berarti kebijakan redaksional merdeka.com terbebas dari bias media massa. Sebagaimana media online pada umumnya, merdeka.com dalam operasionalisasi kerja jurnalistiknya secara finansial bergantung pada pemasuk iklan sehingga sering kali masalah konflik kepentingan antara nilai obyektifitas pemberitaan dengan nilai ekonomis bisnis menjadi suatu hal yang sulit dihindari.

Dengan pendekatan analisis framing, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi realitas yang dibangun oleh media massa online Merdeka.com dan Suarakarya.id tentang pemberitaan pelanggaran etika ketua DPR RI. Konstruksi realitas yang dimaksudkan akan bisa dicermati dari cara bagaimana keduanya melakukan pembingkai dengan mengarahkan konstruksi pemberitaan mengenai Setya Novanti sebagai ketua DPR RI yang diduga melakukan pelanggaran etika dan oleh MKD (Majelis Kehormatan Dewan) dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etika, dengan cara ke dua media tersebut menonjolkan pada beberapa aspek ke dalam isi berita

Hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif dan penekanan pada analisis framing ini diharapkan memberikan kontribusi pada wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai bias pemberitaan yang dilakukan oleh media massa online. Di samping itu, hasil penelitian juga memberikan kesadaran bagi pihak jurnalis dari kedua media tersebut untuk merenungkan kembali akan arti penting nilai berita yang independen dan obyektif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Hampir seluruh kajian tentang komunikasi massa, antara lain kajian dari Mc Quail, mengakui bahwa media massa memiliki dampak yang signifikan. Premis ini harus dipahami sebagai hasil diskusi temporer dari kalangan ilmuwan yang telah mengalami perubahan paradigma dalam beberapa dekade. Menurut Mc Quail, sejarah panjang penelitian dampak komunikasi massa dikelompokkan menjadi empat tahapan. Tahap pertama penelitian dampak media massa didominasi oleh pengalaman strategi propaganda selama perang dunia pertama dimana dampak media massa lebih cenderung pada aspek attitudes (sikap). Tahap kedua, yaitu pada akhir tahun 1960-an

yang memunculkan premis berupa peninjauan kembali atau perbaikan dari premis sebelumnya tentang paradigma kekuatan media massa. Pada tahap ini ada pengakuan bahwa pengaruh personal dijadikan pertimbangan sebagai hal yang sangat mempengaruhi perubahan sikap individu. Kalpper (1960) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa kampanye media massa tidak mempengaruhi masyarakat, pengaruh dominan dari kampanye adalah penguatan kembali sikap yang sebelumnya sudah dimiliki seseorang. Tahap ketiga, dimulai tahun 1970-an yang didominasi oleh penelitian tentang kekuatan baru pengaruh media massa (Noelle-Neumann, 1973). Pada tahap ketiga ini fokus penelitian mengungkap kembali perubahan sikap, seperti temuan hasil penelitian di Kolombia yang menyatakan bahwa dampak media massa terjadi lebih banyak pada tataran kognitif (Beniger & Gusek; 1995). Tahap keempat termasuk yang terjadi sekarang ini dimulai pada awal tahun 1980-an yang ditandai dengan konstruktifisme sosial. Gambaran tentang penerimaan pesan media massa pada tahap ini adalah kombinasi dari kekuatan dan keterbatasan dampak media massa. Pada satu sisi media massa memiliki dampak yang sangat kuat terhadap konstruksi realitas sosial yaitu dengan membongkar gambaran tentang realitas. Sebaliknya, pengaruh media massa dibatasi oleh interaksi antara media massa dan penerima pesan media massa. Wacana media massa merupakan bagian dari proses dimana individu menyusun arti, dan opini publik adalah bagian dari proses yang dikembangkan oleh jurnalis serta kristalisasi makna dalam wacana publik (Gamson & Modigliani, 1989).

Demikian pula realitas komunikasi politik, pembingkaiannya harus dibuat dan dijalankan berdasarkan atas konstruktifisme sosial. Tindakan media massa menyusun kerangka referensi dimana pembaca atau penonton menggunakan interpretasi dan diskusi isu sosial. Dalam hal ini Neuman dan kawan – kawan berpendapat media massa menyajikan suatu bingkai berita, menyajikan suatu pemberitaan dengan mempertimbangkan organisasi mereka dan mempertimbangkan kendala finansial, penilaian profesional, penilaian tertentu tentang audiens (Neuman;1992). Pada waktu yang sama proses masyarakat mendapatkan informasi dan menginterpretasikan informasi dipengaruhi oleh struktur pemaknaan yang ada sebelumnya. Kosicki dan McLeod menengarai terdapat tiga dimensi proses penyusunan berita (Kosicki & McLeod, 1990). Dimensi ini merujuk pada individu yang sedang mencari sumber informasi tambahan yang didasarkan pada asumsi bahwa informasi media massa pada umumnya tidak lengkap, bertendensi atau dengan kata lain diwarnai dengan keinginan komunikator. Informasi yang didapat dari media massa akan

direfleksikan sebagai mahan renungan untuk berfikir kembali atau mereka diskusikan dengan pihak lain tentang apa yang telah mereka dapatkan dari media massa guna mendapatkan pemahaman sepenuhnya tentang pembelajaran dari media massa. Akhirnya, proses selektif pemilihan dan penggunaan media massa hanya untuk mencari informasi yang relevan dengan kepentingan mereka. Mereka akan mengabaikan isi pesan yang tidak relevan dan tidak penting. Pada dasarnya menurut pendekatan model konstruktif dampak media massa, komunikasi mengandalkan “ versi bangunan realitas dari pengalaman personal, interaksi intensif dengan pihak lain, dan selektif menginterpretasikan informasi dari media massa (Neuman et al; 1992).

Model interaktif konstruksi realitas memiliki implikasi penting untuk membimbing pembentukan konsep sebagai teori efek media. Analisis, dimana komunikasi dan media massa berperan dalam pendekatan konstruktif penelitian memiliki beragam tingkat analisis. Berkaitan dengan tingkat mikro dan makro analisis bukanlah hal yang baru dan telah disusun sebagai sebuah postulat dalam disiplin lain seperti sosiologi psikologi politik. Di bidang penelitian komunikasi massa, analisis multi tingkat dapat diurutkan dengan menggunakan model metateori untuk antar tingkat dan ke dalam tingkat analisis (McLeod & Pan, 1989).

Implikasi penting dari framing yang dilakukan oleh redaksi media massa adalah masalah bias media massa. Bias media massa merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari karena sudah merupakan konsekuensi dari hasil framing. Pada konteks komunikasi massa, isi pesan komunikasi tidak bisa dipisahkan dengan media massa. Isi pesan tersebut sering kali diidentikkan dengan istilah berita meskipun dalam beberapa hal ada perbedaan antara isi pesan yang dikategorikan sebagai berita dan isi pesan yang berupa opini. Bahkan dalam aliran jurnalisime klasik harus ada pembedaan yang tegas antara news (berita) dan views (opini).

Salah satu batasan pengertian tentang berita adalah laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian orang banyak (Kustadi;2004). Oleh karena itu media massa menyajikan berita yang ditujukan untuk melayani masyarakat luas, keberpihakan media massa merupakan keberpihakan pada kebenaran untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga dalam menjalankan tugas jurnalistik sudah semestinya jurnalis atau wartawan senantiasa memegang prinsip obyektifitas. Sifat obyektifitas jurnalistik adalah suatu tindakan atau sikap tertentu yang mencakup pekerjaan mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan informasi (Morissan;2013).

Meskipun obyektifitas pemberitaan media massa menjadi faktor penting dalam jurnalistik namun untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah karena dalam proses jurnalistik terdapat banyak hal yang melingkupi wartawan seperti tekanan psikologis pemilik modal kapital, pengaruh ideologi organisasi media massa, kepentingan ekonomi awak media dan sebagainya. Oleh karena itu produk jurnalistik banyak diwarnai dengan bias pemberitaan.

Bias pemberitaan mengacu pada hal-hal seperti distorsi terhadap realitas, memberikan gambaran negatif terhadap kelompok-kelompok minoritas, mengurangi atau mengabaikan peran wanita dalam masyarakat atau mendukung partai politik atau filosofi tertentu (Morissan;2013).

Lebih jauh lagi Eriyanto menggarisbawahi pandangan konstruksionis yang menilai bahwa berita tidak lepas dari opini karena ketika meliput, wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif (Eriyanto, 2011, h. 31). Pembuatan konstruksi berita tidak hanya dipengaruhi oleh faktor psikologi wartawan tetapi juga organisasi, dan politik media massa (Entman, Matthes, & Pellicano, 2009)

Dari sinilah pangkal dari bias media massa dimana kita tidak akan menjumpai produk jurnalistik yang benar-benar menjunjung tinggi obyektivitas pemberitaan melainkan berita dibuat oleh wartawan untuk memenuhi tujuan tertentu. Dengan adanya tujuan dari pembuatan berita maka berita tersebut tidak lagi murni pelaporan apa yang ada di lapangan, sebagaimana tugas yang seharusnya diemban oleh reporter untuk menyajikan pemberitaan yang obyektif, tidak memihak atau seimbang. Tujuan dari pembuatan berita tersebut secara umum dapat dilihat dari siapa pemilik media massa dan apa visi-misi pada media massa yang memuat berita tersebut (Tamburaka, 2012).

Bias pemberitaan bukan satu – satunya dampak dari framing yang dilakukan awak media. Lebih luas lagi, dampak framing akan dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna media yang bersangkutan. Asumsi yang melekat tentang efek media yang dipaparkan oleh teori agenda setting. Teori ini memberikan gambaran bagaimana media massa mampu mempengaruhi perhatian publik terhadap isu-isu tertentu. Walter Lipmann memberikan terminologi terhadap isu-isu yang mendapat perhatian masyarakat (public) sebagai “the picture in our heads” sebagai tingkat pertama agenda setting. Pada tingkat pertama ini, agenda setting terfokus pada “What the picture are about”. Sedangkan tingkat ke dua dari agenda setting menjadi bahan kajian pada ranah analisis framing media massa. Analisis framing sebagai turunan dari

teori agenda setting lebih terfokus pada literasi mengenai “picture” yang ada dalam pikiran tersebut. Jadi agenda setting pada level pertama banyak mengulas tentang sebuah gambar, sedangkan agenda setting level kedua (analisis framing) lebih dari sekedar penjelasan apa yang sebenarnya makna dari gambar tersebut (Coleman, McComb, et al;2009).

2. Metode

Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami isi berita media online yang bersifat bias. Bias media menjadi suatu hal yang tidak terelakkan mana kala media tersebut membawa misi dan visi tertentu yang terefleksikan dalam setiap pemberitaannya. Untuk lebih memahami kontekstual sebuah pemberitaan media massa dengan analisis framing serta untuk mengurai bias media massa atas suatu liputan pemberitaan tentang isu pelanggaran etik ketua DPR RI, maka penulis mengambil data yang berupa pemberitaan dari dua *mainstream* media online, Merdeka.com dan Suarakarya.id sebagai sumber data utama. Kedua media tersebut sengaja dijadikan obyek penelitian analisis framing dengan pertimbangan bahwa Merdeka.com merupakan media massa yang memiliki karakteristik murni jurnalisme online berbahasa Indonesia dan secara organisatoris tidak berafiliasi dengan ideologi politik tertentu. Sedangkan Suarakarya.id sengaja dipilih sebagai obyek yang diteliti dengan pertimbangan bahwa media ini merupakan pengembangan media cetak harian Suara Karya yang terbit pertama kali di tahun tujuh puluhan. Secara organisatoris Suarakarya online maupun versi cetak, berafiliasi ideologi politik dengan Partai Politik Golongan Kaya, partai yang menjadi kendaraan utama Setya Novanto dalam meniti karier di parlemen.

Dua media massa online yang dijadikan subyek penelitian adalah Merdeka.com dan Suarakarya.id. Kedua media tersebut termasuk dua dari beberapa *mainstream* media online di Indonesia. Merdeka.com merupakan media massa temporer yang memiliki karakteristik murni jurnalisme online yang secara organisatoris tidak berafiliasi dengan ideologi politik tertentu. Sedangkan Suarakarya.id merupakan media online kepanjangan tangan dari harian umum Suara Karya (versi cetak yang sudah terbit sejak tahun 1970-an) di mana secara organisatoris media ini baik suarakarya online maupun versi cetak, berafiliasi ideologi politik dengan Partai Politik Golongan Kaya, partai yang menjadi kendaraan utama Setya Novanto dalam meniti

karier di parlemen. Oleh karena itu hasil penelitian akan membedah praktek bias pemberitaan yang dilakukan oleh kedua media tersebut.

Penelitian difokuskan pada isu pemberitaan Setya Novanto di merdeka.com dan suarakarya.id dalam kurun waktu satu bulan, mengenai pelanggaran etika yang dilakukan ketua DPR. Dengan mengambil sampel kurang lebih 5 pemberitaan. Pemilihan rentang waktu untuk mengumpulkan data yang berlangsung satu bulan yaitu pertengahan bulan Nopember sampai pertengahan bulan Desember dilakukan dengan pertimbangan rangkaian peristiwa yang terekspose secara intensif dari ke dua media tersebut terjadi pada rentang waktu tersebut. Setelah pertengahan bulan Desember 2015 intensitas pemberitaan tentang kasus tersebut mulai meredup, dan disusul dengan isu pemberitaan yang lebih aktual yaitu isu seputar pemilihan kepala daerah sebagai agenda media massa pada saat itu.

Kajian tentang bias pemberitaan media massa pada tulisan ini hanya terbatas pada media online merdeka.com dan suarakarya.id dengan menganalisis data yang terkumpul selama kurang lebih satu bulan sejak isu dugaan pelanggaran etika bergulir dan diekspose media massa sampai kasus tersebut ditangani oleh MKD yang menyatakan SN terbukti melakukan pelanggaran etika. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak bisa dianggap sebagai representasi praktek jurnalisme yang berlangsung di Indonesia yang sarat dengan bias ideologi, dan kepentingan politik. Demikian pula, karena yang menjadi subyek penelitian adalah hanya media online maka hasil penelitian tidak bisa diimplementasikan ke ranah praktek jurnalisme konvensional meskipun apabila ada yang berpandangan Suarakarya.id merupakan outlet harian suara karya cetak di dunia maya (cyber space).

Data utama yang dianalisis berupa informasi yang pernah ditayangkan media online merdeka.com dan suarakarya.id terkait isu pelanggaran etika ketua DPR RI. Informasi berupa data yang berwujud teks, style image, grafis dan signal lain yang mempresentasikan Setya Novanto sebagai ketua DPR RI dan segala hal yang terkait dengan pemberitaan pelanggaran etik ketua DPR sebagai obyek penelitian. Untuk melengkapi data yang akan digunakan sebagai data pendukung, maka peneliti melakukan observasi terhadap pemberitaan tentang isu pelanggaran etika tersebut dengan cara browsing melalui mesin pencari data di internet (search engine Google). Jadi, jenis data pendukung berupa arsip pemberitaan tentang isu pelanggaran etika DPR RI yang pernah dimuat di media online internet. Dengan demikian kajian dokumen pemberitaan media online yang penulis lakukan bertujuan untuk

mengungkap hal apa saja yang menjadi bagian yang dikedepankan dalam pemberitaan kedua media tersebut serta aspek mana yang cenderung dikaburkan oleh media yang bersangkutan.

Analisis data menggunakan metode analisis framing yaitu analisis yang mengaris bawahi penekanan atau penonjolan perspektif, konsep, unsur berita, dan interpretasi dari kedua media yaitu merdeka.com dan suarakarya.id dalam rangka merekonstruksi peristiwa yang dijadikan berita yaitu isu pelanggaran etika yang dilakukan ketua DPR RI. Analisis framing dilakukan dengan menggunakan alat dari Pan dan Kosicki. Tools of analysis tersebut dikategorikan menjadi empat struktur yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik dan struktur retorik.

3. Analisis Hasil Penelitian

Sosok SN dalam kasus pemberitaan papa minta saham akan nampak jelas dari konstruksi realitas yang dilakukan oleh media online merdeka .com dan suarakarya.id. Kedua media online tersebut merepresentasikan SN dalam perspektif yang berbeda sekaligus merupakan cerminan bias pemberitaan dari keduanya. Representasi yang diciptakan Merdeka.com dan Suarakarya.id terhadap sosok SN berupa pemaknaan konsep yang ada dalam pikiran jurnalis yang diekspresikan melalui bahasa dalam konteks perspektif masing – masing media online tersebut. Dengan mengadopsi batasan yang cukup tegas dari Stuart Hall (1997) mengenai pengertian representasi sebagai proses produksi meaning dengan menggunakan bahasa, hasil analisis framing dari beberapa pemberitaan kedua media online, konstruksi realitas tentang SN bisa dicermati dari tabel di bawah ini :

Konstruksi Realitas Tentang SN Dalam Pemberitaan Kasus “Papa Minta Saham”.

No.	Media Online	Konstruksi realitas tentang SN
1	Merdeka.com	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar etika jabatan, melanggar kewenangan jabatan. • Pelaku skandal ‘papa minta saham’. • Makelar hebat kelas kakap. • Dua kali membikin malu DPR.
2	SuaraKarya.id	<ul style="list-style-type: none"> • kesatria yang patut dijadikan teladan oleh pejabat lain termasuk JK (Wapres Jusuf Kala). • Tindakan pengunduran diri SN sebagai budaya baru yang patut diapresiasi dan dijadikan teladan.

3.1 SN Melakukan Pelanggaran.

Konstruksi realitas yang dibangun merdeka.com tentang pelanggaran etika dan pelanggaran kewenangan jabatan yang dilakukan SN terindikasi dari beberapa idiom, kata, dan beberapa istilah termasuk kata ganti yang digunakan sebagai atribut negatif SN. Atribut – atribut negatif yang ditujukan kepada SN tampak dari penggunaan beberapa kata, frase kalimat (noun phrase) yang bermakna penghakiman seperti: melanggar etika, melanggar kewenangan, melibatkan, terindikasi melakukan pelanggaran etika jabatan, melanggar kewenangan jabatan, Skandal yang dilakoni ketua DPR, pemeriksaan terhadap SN, Lengser sebagai ketua DPR, pemalakan PT Freeport oleh SN, kompak sikat SN, ditangkap KPK, terlibat dalam sejumlah kasus korupsi, bisa dijerat Kejaksaan.

Mencermati beberapa frasa kalimat yang dipilih redaksi merdeka.com dalam pemberitaan mengenai kasus pelanggaran etika yang dilakukan ketua DPR, representasi yang dilakukan merdeka.com terhadap figur SN sebenarnya lebih mengarah pada trial by press mengingat pada waktu kejadian tersebut di ekspose merdeka.com, proses pengadilan (sidang MKD) sedang berlangsung. Kalimat, kata dan frasa kalimat yang dipakai merdeka.com mengesankan bentuk penghakiman media massa yang memvonis SN sebagai pihak yang melakukan pelanggaran. Berapa frasa kalimat yang bersifat tendensius terhadap representasi SN sebagai pelaku pelanggaran bisa kita jumpai misalnya secara gamblang dideskripsikan keterangan yang dikutip persis dari beritanya yaitu Budi Arie Setiadi selaku ketua umum Projo yang mengungkapkan bahwa, ‘Rakyat sudah pasti kecewa dan marah skandal ‘papa minta saham’ yang dilakoni Ketua DPR Setya Novanto terbongkar’.

Pada frasa kalimat yang lain misalnya kepala berita yang direalis tanggal 4 Desember 2015 pukul 08:35, tertulis, ‘Kapolri & Jaksa Agung kompak sikat Setya Novanto, KPK tak cawe-cawe’. Demikian pula headline yang direalis tanggal 19 Desember 2015 mengasumsikan nada ancaman terhadap SN sebagaimana yang tertulis pada judul berita tersebut bahwa, ‘Mundur dari kursi ketua DPR, Setya Novanto bisa dijerat Kejaksaan’.

Kata sikat secara leksikan bermakna membersihkan sampai habis dari semua kotoranyang melekat. Arti kata tersebut kemudian diadopsi untuk memaknai tindakan menghabisi seseorang dalam peran tertentu. Pada konteks ini kata kompak sikat SN

dapat dimaknai bahwa SN adalah pihak yang bersalah sehingga mereka sepakat menghabisi SN tanpa toleransi.

3.2. SN sebagai makelar kelas kakap.

Dalam tulisan yang muncul pada tanggal 18 Nopember 2015 pukul 13:00 WIB, secara terang-terangan Merdeka.com memberi label SN sebagai makelar kelas kelas kakap. Mengambil headline, ‘Setya Novanto, makelar hebat kelas kakap’, jurnalis Didik Supriyadi secara runtut memaparkan sepak terjang keterlibatan SN dalam beberapa skandal korupsi besar pada setiap era pemerintahan. Dari paragraf ke paragraf berikutnya, liputan yang dilakukan merdeka.com mendeskripsikan kasus korupsi yang melibatkan SN ditengah jenjang karier politik SN yang terus menanjak sampai bisa menduduki tampuk pimpinan DPR RI.

Paragraf pertama, memaparkan keterlibatan SN dalam permainan hak tagih Bank Bali. Pada kasus tersebut beberapa elite politik masuk penjara tetapi SN hanya dipanggil sebagai saksi. Paragraf kedua, menginformasikan bagaimana pada zaman presiden Gus Dur, ketua Umum Partai Golkar yang dijabat Akbar Tanjung nyaris masuk penjara. Paragraf ketiga, menginformasikan kedekatan Ketua Umum Golkar, Akbar Tanjung dengan Ketua Umum PDIP Megawati, memberikan peluang elite partai Golkar memainkan kembali peran makelar izin, makelar proyek dan makelar kasus. Paragraf ketiga, mengungkapkan bagaimana pada masa periode pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), para elite politik partai Golkar menghidupkan kembali peran makelar. Pada paragraf ketiga, merdeka.com secara eksplisit menyebutkan sebagai aktor penting kasus permainan beras impor beras Vietnam.

Paragraf keenam, labeling makelar proyek e-KTP kembali disandang SN, kasus e-KTP senilai 2,5 trilyun terjadi pada periode kedua pemerintahan SBY. Paragraf ketujuh, kasus paling aktual dimana Sudirman said menunjukkan barang bukti aksi makelar SN di hadapan petinggi PT Freeport kepada MKD. Pada paragram terakhir sebagai penutup pemberitaan, stigma negatif kembali melekat pada sosok SN sebagai makelar kelas kakap dalam periode kasus skandal rencana perpanjangan ijin PT Freeport.

headline, ‘Setya Novanto, makelar hebat kelas kakap’, jurnalis Didik Supriyadi secara runtut memaparkan sepak terjang keterlibatan SN dalam beberapa skandal korupsi besar pada setiap era pemerintahan. Bahkan pada rangkaian kalimat yang

terdapat pada paragraf ke dua dan ketiga jurnalis merdeka.com menyoroti sisi negatif elite partai Golkar (teks yang tertulis pada paragraf ke dua dan tiga...Akbar Tanjung nyaris masuk penjara.. elite partai golkar memainkan kembali peran makelar izin, makelar proyek dan makelar kasus..) dalam perspektif yang sarat dengan bias ideologi.

Berita tentang makelar hebat kelas kakap bukan saja menyeret merdeka.com dalam pusaran bias by spin semata. Bias by labeling juga terjadi pada berita tersebut hal mana dapat teridentifikasi karena jurnalis merdeka.com tidak membedakan atau menyamakan tindakan SN dengan tindakan Ketua Umum Partai Golkar sebelumnya, Akbar Tanjung beserta elite Golkar lainnya yang terjerat skandal korupsi di setiap era pemerintahan. Jurnalis merdeka.com menggeneralisasikan Ketua umum Golkar beserta elite politik Golkar sebagai makelar.

Berdasarkan analisis setiap teks atau noun phrase yang digunakan jurnalis dalam menyusun berita ‘Setya Novanto, makelar hebat kelas kakap’, unsur bias by selection of sources juga terpenuhi. Dalam berita tersebut jurnalis mengutip pernyataan dari nara sumber yang jelas – jelas berafiliasi politik yang berseberangan dengan Partai Golkar. Dalam beberapa pemberitaannya merdeka.com mengutip pendapat dari Ruhut Sitompol dari Partai Demokrat, juga menggunakan sumber informasi dari NasDem melalui pernyataan Taufiqulhadi yang menyatakan bahwa bikin malu DPR 2 kali. Bahkan jurnalis juga mengutip Politisi Golkar dari Kubu Agung Laksono yaitu Siswono Yudohusodo selaku Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Ancol yang menyatakan bahwa dua kali SN permalukan DPR.

3.3. SN Mempermalukan DPR.

Representasi SN sebagai pihak yang mempermalukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditulis oleh jurnalis Merdeka.com melalui tiga buah berita yang muncul pada waktu yang berbeda. Berita pertama dan berita kedua dirilis pada hari yang sama, Rabu 18 Nopember 2015 dengan waktu yang berbeda. Berita pertama dengan judul headline Sudah dua kali Setya Novanto bikin malu DPR, ditulis pada pukul 10:25 WIB. Pada bagian akhir pemberitaan tersebut mengutip pernyataan Siswono, politisi Golkar kubu Agung Laksono. Kalimat penutup berita tersebut berupa kutipan nara sumber berita, “Ini dua kali dia permalukan DPR,” cetus Siswono.

Berita kedua dirilis pada hari yang sama Rabu 18 Nopember 2015, siang harinya pada pukul 13:03 WIB dengan judul berita, ‘Bikin malu DPR 2 kali, NasDem minta Setnov

mengundurkan diri'. Menilik sumber berita yang dijadikan acuan jurnalis, tentu saja termasuk pemberitaan yang dikategorikan bias by selection of sources.

Framing berita yang mengekspose SN pembuat malu legislatif dilakukan jurnalis merdeka.com pada hari Kamis 3 Desember 2015 pukul 13:59 dengan narasumber Ketua Umum relawan Projo (Pro Jokowi) Budi Arie Setiadi. Berita dengan headline "Relawan soal 'papa minta saham': Ini penghinaan buat Bangsa" sebagian isi beritanya menyajikan sikap dan pendapat Relawan Jokowi waktu Pilpres 2014 melalui ungkapan Ketua Umum Projo bahwa, " rakyat sudah pasti kecewa dan marah skandal 'papa minta saham' yang dilakoni Ketua DPR Setya Novanto terbongkar".

Kata atau frase kalimat yang digunakan dalam menyusun berita, kata 'bikin malu' dan kata penghinaan merupakan kata yang bermakna menciderai perasaan pihak lain. Suatu kata yang berkonotasi buruk karena ada tindakan tercela dari satu pihak untuk menciderai pihak lain, atau terdapat tindakan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan terhadap korban kekerasan tentu saja dalam pengertian kekerasan fisik maupun psikis. Sehingga pada ketiga berita tersebut framing yang disusun merdeka.com adalah pemberitaan yang memposisikan SN sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap legislatif dan pelaku tindak kekerasan dengan korban DPR dan bangsa Indonesia.

3.4. SN Kesatria dan patut diapresiasi.

Representasi SN yang dibangun oleh Suarakarya.id paling tidak tercermin dari dua buah berita yang diunggah 27 Desember 2015 09:08 WIB dan 28 Desember 2015 05:31 WIB. Framing yang dilakukan Suarakarya.id tentang sikap kesatria SN hanya dilihat dari peristiwa pengunduran diri SN dari jabatannya. Dalam proses framing tersebut Suarakarya.id hanya melihat satu sisi dari tindakan pengunduran diri tersebut. Redaksi tidak melihat dari perspektif lain yaitu kapan moment pengunduran diri tersebut. Seperti yang diungkapkan para pengamat politik di media lain bahwa pengunduran diri SN sudah terlambat dan tidak bermakna sama sekali karena mundur atau dimundurkan SN pasti mundur. SN mundur karena sudah tidak ada opsi lain, dia dalam posisi terjepit. Lain halnya jika pengunduran diri SN dilakukan jauh hari sebelumnya atau sebelum sidang MKD menyatakan bahwa SN terbukti melanggar etika jabatan. Hal inilah yang sama sekali tidak pernah diungkap dalam pemberitaan suarakarya.id., sehingga dapat dikatakan redaksi terjebak dalam bias by placement. Pola penempatan berita Suarakarya.id mengecilkan informasi pendukung yaitu bagaimana sikap dan tindakan SN sebelum kasus "papa minta pulsa" masuk ranah

persidangan MKD hingga semua anggota MKD menyimpulkan SN terbukti melakukan pelanggaran etika legislatif dan melanggar kewenangan jabatan. Dalam sebuah berita yang adil dan seimbang mestinya reporter akan meringkas rangkaian peristiwa pengunduran SN secara holistik melalui rangkaian pemberitaan satu peristiwa dengan peristiwa lain yang saing terkait. Demikian pula jika berpegang pada prinsip-prinsip praktek jurnalistik mestinya redaksi juga memaparkan sumber berita lain dan pandangan rival politik partai Golkar dalam tempat yang sama pada ruang pemberitaan tersebut sehingga nilai sebuah berita benar-benar terjaga dari nilai obyektif dan berimbang. Apabila redaksi mampu memosisikan dirinya sebagai seorang jurnalis, bukan sebagai politisi yang berafiliasi dengan ideologi nara sumber beritanya, maka redaksi tidak akan terjebak pada bias *by selection of sources* seperti itu. Oleh karena itu dibutuhkan keberanian seorang jurnalis untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip jurnalistik yang independen, obyektif dan berimbang dimana dalam menjalankan profesi mulia tersebut harus terbebas dari semua kepentingan ideologi politik yang menjadi afiliasi lembaga pers yang bersangkutan.

4. Kesimpulan

Dari analisis framing sebagai mana yang telah dikupas pada bagian temuan data dan interpretasi hasil penelitian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa media online Merdeka.com merekonstruksi realitas sosok Setya Novanto yang menjadi obyek berita media tersebut direpresentasikan sebagai (1) elite politik yang melanggar etika dan otoritas jabatan, (2) Makelar kelas kakap, (3) Politisi yang mempermalukan rakyat. Sedangkan Suarakarya.id dalam rangkaian pemberitaan kasus ‘papa minta saham’ merepresentasikan Setya Novanto sebagai (1) Pengejawentahan sikap kesatria, (2) politisi yang patut diapresiasi dan diteladani. Akibat framing proses pemberitaan yang dilakukan kedua media online tersebut maka memunculkan bias media massa. Mengacu pada pendapat Brent H. Baker (2015), tentang beragam tipe bias media massa, bias yang muncul dari pemberitaan kasus ‘papa minta saham’ lebih didominasi oleh *bias by selection of sources* dan *bias by placement*. Kedua media melakukan peliputan berita dengan merujuk pada sumber berita yang sejalan dengan ideologi politik mereka. Kedua redaksi juga melakukan peliputan dan penempatan berita secara tidak proposional. Merdeka.com kurang bijak dalam mengimplementasikan prinsip praduga tak bersalah terhadap SN, pada sisi lain Suarakarya.id menepis fakta-fakta

pemberitaan yang mengarah pada bukti keterlibatan SN langgar legislatif dan melanggar etika jabatan.

Berdasarkan simpulan sebagaimana dipaparkan di atas, beberapa saran yang lebih bersifat implikatif dapat dikemukakan bahwa representasi yang dibangun media online Mereka.com terhadap Setya Novanto cenderung merugikan elite politik Partai Golkar. Reporter Merdeka.com yang terlibat dalam liputan kasus ‘papa minta saham’ belum sepenuhnya mengemban misi jurnalistik yang melakukan peliputan secara obyektif dan berimbang dan cenderung mengarah pada trial by press, mendiskreditkan dan memojokan serta mengeneralisasikan tindakan ketua Umum partai Golkar sebagai tindakan elite Partai Golkar pada umumnya.

Pada sisi yang lain media online Suarakarya.id mengkonstruksi realitas kasus ‘papa minta saham’ dalam perspektif ideologi politik Golkar yang meletakkan SN sebagai pejabat publik yang perlu dilindungi dengan mengedepankan aspek praduga tidak bersalah serta menekankan pentingnya kesamaan atau kesetaraan perlakuan di setiap kasus hukum. Suarakarya.id menyoroti kasus ‘papa minta saham’ tidak berbeda jauh dengan kasus skandal korupsi yang melibatkan para pejabat elit sebelumnya.

Kasus ‘papa minta saham’ itu sendiri merupakan kasus yang mengundang pro dan kontra. Oleh karena itu bagi awak media tidak terkecuali media online hendaknya tetap berpegang teguh prinsip praktik jurnalistik yang obyektif, pemberitaan yang berimbang tanpa harus mengorbankan ideologi, visi dan misi yang menjadi karakter masing-masing media tersebut. Dengan kata lain sebesar apapun tekanan psikologis yang dihadapi seorang jurnalis, mereka harus bijak menyelesaikan konflik kepentingan demi menjaga prinsip – prinsip praktek jurnalistik demi kejujuran sebuah pemberitaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Brent H. Baker, (2015). How to Identify Liberal Media Bias, in <https://www.studentnewsdaily.com/types-of-media-bias/>. 11-11-2015; 13.30 PM
- Coleman, R., McCombs, M., Shaw, D., & Weaver, D. (2009). Journalism and Globalization, in K. Wahl-Jorgensen, T. Hanitzsch (Ed.). *The handbook of journalism studies* New York :. Routledge.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta : LkiS
- Entman, R.M., Matthes, J., & Pellicano, L. (2009). Nature, Sources, and Effects of News Framing. Dalam K. Wahl-Jorgensen, T. Hanitzsch (Ed.). *The handbook of journalism studies* (h, 175-190). New York : Routledge.
- Gamson, W. A., & Modigliani, A. (1989). *Media discourse and public opinion on nuclear*
- Klapper, J. (1960), *The Effects of Mass Communication*, New York: Free Press.

- Hall, Stuart. 1979. Representation: Culture Representation and Signifying Practices. London: Sage Publication
- Kustadi, Suhandang. 2004. Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, & Kode Etik, Bandung, Nuansa Cendekia.
- Kosicki, G. M., & McLeod, J. M. (1990). Learning from political news: Effect of media images and information-processing strategies. In S. Kraus (Ed), Mass communication and political information processing, Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- McLeod, J. M. & Pan. Z (1989). Getting level across and crossing levels. American Behavioral Scientist.
- McQuail, D. (1994), Mass Communication theory: An introduction (3rd ed), Thousand Oaks, CA: Sage.
- Morissan; Wardani, A.C; Hamid, Farid. (2013). Teori Komunikasi Massa, Bogor, Ghalia.
- Noelle-Neumann, E. (1973), Return to the concept of powerful mass media, Studies of Broadcasting, 9.power: A constructionist approach. American Journal of Sociology.
- Tamburaka, A. (2012). Agenda Setting Media Massa. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Thapthiang, N. (2012). Analysis of news reporting on south Thailand insurgency: What has been “in” and what has been “out”? And what should be next? Research Report. Pattani: Faculty of Communication Sciences, Prince of Songkla University